

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN DAYA DUKUNG WILAYAH
UNTUK EVALUASI PENENTUAN PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR 2005 - 2014**

PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Geografi



Diajukan Oleh:

Triawan

NIM : E100120098

**FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN DAYA DUKUNG WILAYAH UNTUK
EVALUASI PENENTUAN PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR 2005-2014**

TRIAWAN

NIM : E100120098

Telah disetujui dan akan dilaksanakan ujian skripsi pada :

Hari : **Kamis**.....

Tanggal : **21 April 2016**.....

Tanda Tangan

Pembimbing I : Drs. M Musiyam, M. Tp

Pembimbing II: Dra. Umrotun, M. Si


(.....)


Surakarta, 14 April 2016

Mengetahui,

Sekretaris Fakultas



(Drs. Yuli Priyana, M. Si)

HALAMAN PENGESAHAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN DAYA DUKUNG WILAYAH UNTUK
EVALUASI PENENTUAN PUSAT PEMERINTAHAN
KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR 2005-2014**

TRIAWAN

NIM : E100120098

Telah dipertahankan di depan team penguji pada

Hari/tanggal : Kamis, 21 April 2016

dan telah dinyatakan memenuhi syarat

Team Penguji

Ketua : Drs. M Musiyam, M. TP

Sekretaris : Dra. Umrotun, M. Si

Anggota : Drs. Priyono, M. Si

Pembimbing I : Drs. M Musiyam, M. TP

Pembimbing II: Dra. Umrotun, M. Si

Tanda Tangan

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Surakarta, 27 April 2016

Dekan
(Drs. Priyono, M. Si)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, baik PTN maupun PTS dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan dimasukkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 27 April 2016

Penulis



(Triawan)

Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk Evaluasi Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Jawa Timur 2005-2014

Analysis of Regional Development and Capability for Determination Evaluation of Central Government Madiun District East Java in 2005-2014

Triawan¹, M Musiyam² dan Umrotun³

^{1,2 dan 3} *Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.*

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah 57102

**Email : Teratriawan93@gmail.com*

ABSTRAK

Mengingat pentingnya peran dan fungsi pusat pemerintahan dalam mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 serta menentukan dan mengevaluasi wilayah kecamatan yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keruangan dan kompleks wilayah. Metode yang digunakan yaitu evaluasi sumatif. Perkembangan Kabupaten Madiun dianalisis dengan tiga indikator utama yaitu : (1) ekonomi dan demografi; (2) aksesibilitas, transportasi dan komunikasi; dan (3) pelayanan sosial ekonomi. Sedangkan Daya dukung dianalisis melalui analisis kawasan lindung dan analisis daya dukung lahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan di Kabupaten Madiun cukup baik, dimana wilayah yang masuk dalam klasifikasi maju pada tahun 2004 hanya tiga kecamatan sedangkan yang masuk klasifikasi berkembang dan tertinggal ada enam kecamatan. Namun pada tahun 2009 wilayah yang masuk klasifikasi maju menjadi empat kecamatan; lima kecamatan masuk klasifikasi berkembang; dan enam kecamatan yang masuk klasifikasi tertinggal. Perkembangan di Kabupaten Madiun terus berlanjut hingga tahun 2014 yang hanya ada tiga kecamatan dengan klasifikasi tertinggal; delapan kecamatan dengan klasifikasi berkembang dan empat kecamatan dengan klasifikasi maju. Analisis kawasan lindung menghasilkan wilayah yang memiliki daya dukung untuk pengembangan perkotaan hanya Kecamatan Kare dan Saradan dengan klasifikasi potensial. Sedangkan analisis daya dukung lahan menunjukkan semua wilayah di Kabupaten Madiun potensial untuk mendukung pengembangan perkotaan kecuali Kecamatan Dagangan, Gemarang dan Kare.

Berdasarkan hasil penelitian, wilayah yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Dolopo. Terlepas bahwa Kecamatan Mejayan yang dipilih sebagai ibukota kabupaten pada tahun 2010, padahal perkembangan wilayahnya masuk dalam klasifikasi berkembang dari tahun 2005-2014. Mengingat peran penting dan fungsi pusat pemerintah, hendaknya pemerintah segera melakukan percepatan pembangunan terutama di Kecamatan Mejayan sehingga tujuan pemindahan pusat pemerintahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat segera terwujud, serta mampu menjadi pusat pertumbuhan dan merangsang perkembangan daerah sekitarnya.

Kata kunci : tingkat perkembangan, daya dukung, evaluasi dan penentuan pusat pemerintahan

Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk Evaluasi Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Jawa Timur 2005-2014

Analysis of Regional Development and Capability for Determination Evaluation of Central Government Madiun District East Java in 2005-2014

Triawan¹, M Musiyam² dan Umrotun³

^{1,2 dan 3}Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Surakarta, Jawa Tengah 57102

**Email : Teratriawan93@gmail.com*

ABSTRACT

Given the importance of the role and functions of the center of government in supporting economic growth and development. This research aims to : Analyze the spatial variation of the level of development and the carrying capacity of the area in Madiun District in 2005-2014 as well as determine and evaluate the most suitable sub-district as Capital region in Madiun District. The used approaching methods are Spatial Approaching and Complex Region. The used method is summative evaluation. The development of Madiun District was analyzed by three main indicators: (1) economy and demography; (2) accessibility, transport and communication; and (3) socio-economic services. While carrying capacity are analyzed through the analysis of protected areas and land capacity analysis.

The results showed that the development is quite good in Madiun District, where the area was classified as advanced in 2004 only three sub-district while there are six sub-district classed as developed and underdeveloped. However, in 2009 the region entered the advanced classification become four sub-district; five sub-district classed as developed; and six sub-district were classed as underdeveloped. Developments in Madiun District continued until 2014 there were only three sub-district with underdeveloped classification; eight sub-district with developed classification and four sub-district with advanced classification. The analysis of protected area generate region that has support for the urban development of the sub-district only Kare and Saradan with potential classification, while the land capacity analysis shows that all regions in Madiun District have potential support to urban development, except the Sub-district Dagangan, Gemarang and Kare.

Based on the research results, the region of the most suitable as the Capital District in Madiun is Sub-district Dolopo. Despite that the Sub-district Mejayan chosen as capital in 2010, when the development of the region is classified as developed from year 2005 to 2014. Given the critical role and functions of the central government, the government should accelerate the development, especially in Sub-district Mejayan so that the move of center of the government to accelerate economic growth and development can be realized, as well as capable of being a center of growth and stimulate the development of the surrounding area.

Keywords : level of development, capacity, evaluation and determination of the government center

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah di beberapa daerah di Indonesia banyak terjadi, namun pengembangan tersebut tidak diikuti dengan perencanaan yang matang. Sehingga masih ada beberapa daerah yang sampai puluhan tahun setelah pemekaran wilayah tidak memiliki pusat pemerintahan, karena pusat pemerintahannya masih berada di wilayah sebelum pemekaran. Kabupaten Madiun yang awal mula pusat pemerintahannya berada di Kota Madiun baru dilakukan pemindahan pada tahun 2010 padahal Kota Madiun sejak tahun 1950 sudah menjadi kota besar yang otonom dan terpisah dari Kabupaten Madiun melalui UU Nomor 16 Tahun 1950. Untuk itu perlu dilakukan penelitian apakah pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Mejayan dilakukan dengan pertimbangan yang baik atau hanya untuk kepentingan politik.

Berdasarkan tiga fungsi Ibukota Kabupaten berkaitan dengan pembangunan Indonesia menurut Sarundajang (1997) dan empat fungsi dasar kota menurut Yunus (2005) serta mengingat peran penting dan fungsi ibukota kabupaten serta tujuan dilakukan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu

untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. seharusnya kecamatan yang dipilih sebagai Ibukota Kabupaten Madiun yaitu wilayah yang memiliki perkembangan dan daya dukung lebih baik dibandingkan kecamatan lain.

Penelitian ini dilakukan terhadap perkembangan dan daya dukung 15 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu Menganalisis variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 serta menentukan dan mengevaluasi wilayah kecamatan yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode evaluasi, apabila dirinci menurut jenisnya merupakan evaluasi sematif. Evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang menekankan pada efektifitas pencapaian program berupa produk tertentu (Kidder, 1981 di dalam Sugiyono, 2013). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keruangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi dokumen resmi Badan Pusat Statistik dan beberapa Instansi Pemerintah yang terkait, dengan cara menyalin dan mengkopi data yang berhubungan dan diperlukan di dalam melaksanakan penelitian. Selain itu untuk referensi tambahan juga digunakan situs resmi pemerintah, Undang-Undang dan sumber lain yang relevan. Data yang dikumpulkan sendiri meliputi data yang digunakan sebagai indikator perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun.

Unit Analisis dalam penelitian ini yaitu Kecamatan, dimana wilayah yang akan diteliti meliputi 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

Hasil penelitian ini yaitu variasi tingkat perkembangan dan daya dukung kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 sebagai dasar untuk mengevaluasi penentuan pusat pemerintahan Kabupaten Madiun. Analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yaitu analisis nonspasial menggunakan skoring, matching, tabel, dan grafik serta analisis spasial menggunakan peta perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun. Selain itu analisis deskriptif

juga digunakan untuk menjelaskan fenomena perkembangan dan daya dukung wilayah.

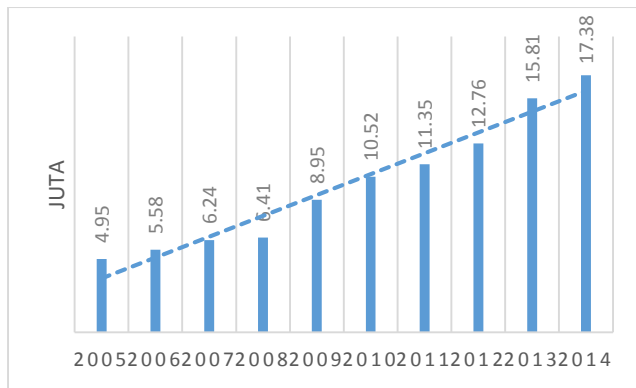
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Variasi Tingkat Perkembangan Wilayah

Kabupaten Madiun terdiri dari 15 kecamatan, dimana dari barat Kabupaten Madiun merupakan dataran rendah dan semakin ke timur merupakan dataran tinggi namun sebagian besar wilayah di Kabupaten Madiun merupakan dataran rendah.

1.1 Indikator Ekonomi dan Demografi Wilayah

Pertumbuhan pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Madiun dari tahun 2005 hingga tahun 2014 terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebesar 4,95 juta hingga tahun 2014 mencapai 17,38 juta dengan rata-rata kenaikan 1,4 juta. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 3,05 juta dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu hanya 0,17 juta, berikut diagram pertumbuhan pendapatan perkapita tahun 2005 hingga tahun 2014 :



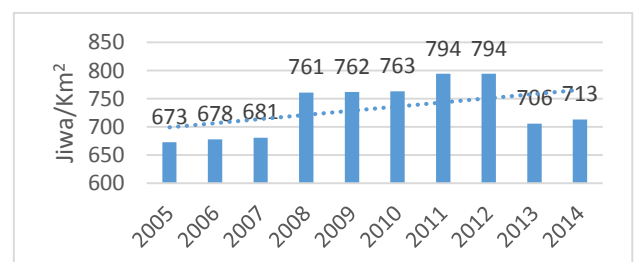
Gambar 1 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Persentase pendapatan perkapita di Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki persentase tertinggi dari tahun 2005-2014 yaitu Kecamatan Saradan dengan persentase dikisaran 9 % pada tahun 2005-2007 dan 10 % pada tahun 2008-2014 kecuali pada tahun 2011 yang mencapai 11,12 %. Wilayah dengan persentase terendah yaitu wilayah Kecamatan Kebonsari dengan persentase dikisaran 1 % pada tahun 2005-2008 dan <1 % pada tahun 2009-2014.

Tren persentase pendapatan perkapita di Kabupaten Madiun dari tahun 2005-2014 menunjukkan peningkatan, meskipun beberapa wilayah mengalami penurunan seperti Kecamatan Kebonsari, Gemarang, dan Pilangkenceng.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Madiun secara keseluruhan mengalami fluktuasi dimana pola kepadatan penduduk dari tahun 2005 hingga tahun 2014 membentuk empat kelompok yaitu; dari tahun 2005 sampai tahun 2007 mengalami peningkatan yang rendah yaitu dikisaran 673 jiwa/Km² pada tahun 2005 dan terus naik hingga 681 jiwa/Km² pada tahun 2007; Kembanli mengalami peningkatan drastis menjadi 761 jiwa/Km² pada tahun 2008 sampai tahun 2010 tiap tahun kepadatannya hanya bertambah satu jiwa/Km²; kelompok ke tiga yaitu tahun 2011 dan 2012 dimana setelah terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya kepadatannya tetap yaitu 794 jiwa/Km²; terjadi penurunan hingga mencapai angka 706 jiwa/Km² pada tahun 2013 dan naik menjadi 713 jiwa/Km² pada tahun 2014, namun tren kepadatan penduduk di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dengan jumlah rata-rata kenaikan empat jiwa/Km² setiap tahunnya.



Gambar 2 Perkembangan Kepadatan Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

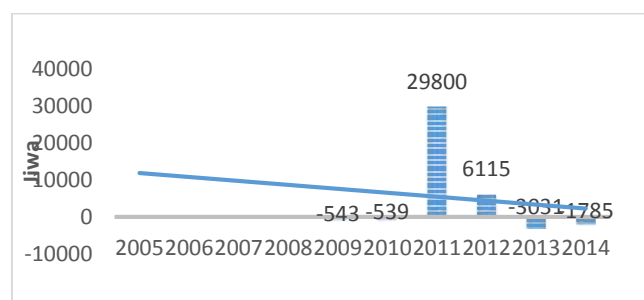
Kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun secara umum mengalami peningkatan. Kepadatan tahun 2005-2014 berada pada kisaran 158-1.908 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi pada tahun 2005-2007 yaitu Kecamatan Jiwan, namun pada tahun 2008-2010 Kecamatan Geger menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi karena terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tinggi.

Kondisi tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2011 dan 2012 Kecamatan Jiwan terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tinggi, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis sehingga kepadatan tertinggi kembali berada di wilayah kecamatan geger hingga tahun 2014. Kepadatan penduduk terendah terjadi di Kecamatan Kare dari tahun 2005-2014, hal ini sangat wajar mengingat wilayah ini berada pada dataran tinggi dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung.

Berbeda dengan Kecamatan Jiwan dan Geger yang sempat mengalami peningkatan drastis serta Kare yang merupakan wilayah dengan

kepadatan terendah wilayah lain di kabupaten madiun meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun trennya mengalami peningkatan.

Migrasi penduduk di Kabupaten Madiun cukup tinggi dengan rata-rata migrasi netto mencapai 138 jiwa per tahun, sebagai daerah yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencarian utama maka tak heran jika lebih tinggi angka migrasi keluar dari pada migrasi masuk. Hal ini bisa dilihat dari migrasi netto 2009 hingga 2010 namun tahun 2011 dan 2012 mengalami kenaikan drastis menjadi 29800 penduduk masuk Kabupaten Madiun dan 6115 penduduk juga masuk pada tahun 2012 namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 dan 2014 dimana pada tahun 2013 migrasi netto -3031 dan pada tahun 2014 hanya -1785 jiwa.



Gambar 3 Migrasi Netto Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Data migrasi di Kabupaten Madiun hanya ada mulai tahun 2009-2014. Analisis data migrasi dan grafik di atas menunjukkan secara umum tren migrasi di Kabupaten Madiun mengalami penurunan, hanya pada tahun 2011 terjadi migrasi besar-besaran. Wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun yang lebih banyak didatangi penduduk yaitu Kecamatan Mejayan pada tahun 2009-2010 namun pada tahun 2011 Kecamatan Saradan menjadi wilayah yang paling banyak didatangi. Tahun 2013 Kecamatan Gemarang menjadi wilayah yang paling sedikit migrasi netto nya namun tahun 2014 Kecamatan Balerejo menjadi wilayah dengan migrasi netto terbesar karena lebih banyak migrasi netto di Kecamatan Gemarang.

Sedangkan wilayah yang cenderung paling banyak ditinggalkan penduduk dari tahun ketahun selalu berubah yaitu Kecamatan Sawahan pada tahun 2009, Saradan pada tahun 2010, Mejayan pada tahun 2011, Madiun pada tahun 2012, Wungu pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 yaitu Kecamatan Gemarang dan Pilangkenceng.

1.2 Indikator Aksesibilitas, Transportasi Dan Komunikasi

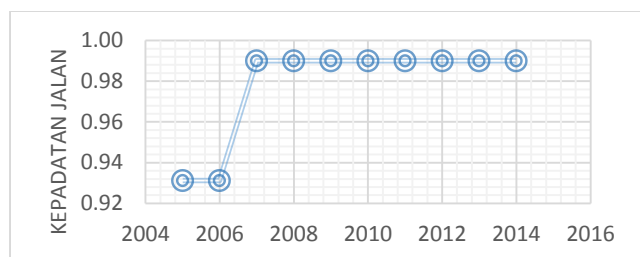
Kepadatan jalan di Kabupaten Madiun dari tahun 2005 hingga tahun

Berdasarkan analisis data dan grafik perkembangan jumlah pendapatan perkapita, kepadatan penduduk dan migrasi netto Kabupaten Madiun, perkembangan indikator ekonomi dan demografi pada masing-masing Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun menunjukkan tahun 2005-2008 kecamatan dengan skor tertinggi yaitu Geger, serta Wungu. Tahun 2009-2012 skor tertinggi yaitu Geger, Dolopo, Wungu dan Jiwan. Skor tertinggi tahun 2013 yaitu Geger dan Dagangan sedangkan pada tahun 2014 skor tertinggi yaitu Jiwan.

Wilayah dengan skor terendah pada tahun 2005-2008 yaitu Kebonsari, Kare, Gemarang dan Sawahan. Pada tahun 2009-2010 skor terendah yaitu Kebonsari, Kare dan Sawahan. Tahun 2011 skor terendah yaitu Kare sedangkan tahun 2012 nilai terendah yaitu Gemarang, Saradan, Madiun dan Sawahan. Skor terendah tahun 2013 yaitu enam meliputi Kecamatan Kebonsari, Kare, Gemarang, Pilangkenceng, Madiun dan Sawahan dan tahun 2014 kecamatan dengan skor terendah yaitu Gemarang.

2014 secara keseluruhan hanya mengalami perubahan sekali yaitu pada tahun 2007, dimana pada tahun 2005-2007 kepadatan jalan di Kabupaten

Madiun hanya 0,93 kemudian dilakukan pembangunan jalan pada tahun 2008 sehingga kepadatan jalannya meningkat menjadi 0,99 hingga tahun 2014.



Gambar 4 Perkembangan kepadatan jalan di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014

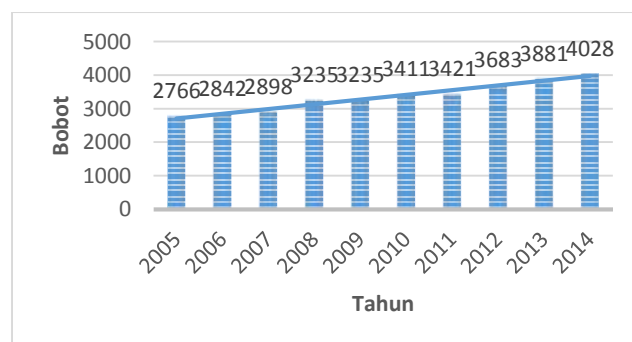
Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Jalan sebagai akses utama darat sudah dibangun semenjak wilayah tersebut terdapat penghuni, sehingga pembangunan jalan jarang sekali dilakukan, yang ada hanyalah perbaikan jalan yang semula tanah menjadi batu, yang semula batu menjadi aspal dan memperbaiki jalan aspal yang telah rusak. Secara umum kepadatan jalan di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan kecuali di Kecamatan Mejayan, dimana dari tahun 2005-2014 tidak mengalami penambahan panjang jalan sehingga kepadatan jalannya tetap yaitu 0,51.

Perkembangan kepadatan jalan selama kurun waktu 2005-2014 menunjukkan peningkatan di semua wilayah kecuali di Kecamatan

Mejayan. Rata-rata peningkatan jalan di Kabupaten Madiun yaitu 0,0065. Wilayah kecamatan dengan nilai kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Dolopo pada tahun 2005-2006 dengan Kepadatan 1,89 dan tahun 2007-2014 dengan kepadatan jalan mencapai 1,93. Kepadatan jalan terendah di Kabupaten Madiun dari tahun 2005 dan 2006 yaitu Kecamatan Gemarang sedangkan tahun 2005-2014 yaitu Kecamatan Mejayan dengan kepadatan jalan hanya 0,51.

Pembangunan sarana transportasi di Kabupaten Madiun dari tahun 2005 - 2014 terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009 yang tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dimana rata-rata peningkatannya mencapai 140 yang mencakup peningkatan transportasi umum bis dan angkutan barang atau truck.



Gambar 5 Perkembangan Fasilitas Transportasi di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

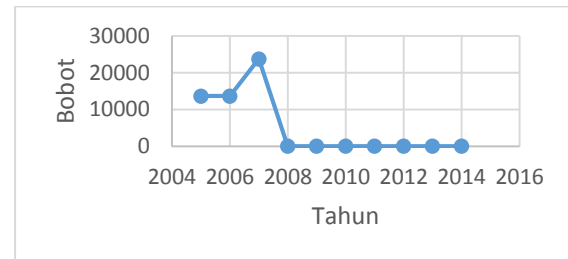
Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Grafik di atas menunjukkan meskipun tren sarana transportasi di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan Kecamatan Geger, Dolopo, Madiun, Mejayan, Wonosari dan Sawahan pada tahun 2014 mengalami penurunan ketersediaan sarana transportasi.

Sarana transportasi pada tahun 2005-2014 di Kabupaten Madiun mengalami perkembangan yang merata disemua wilayah. Wilayah dengan sarana transportasi tertinggi yaitu Kecamatan Geger pada tahun 2005-2007 dengan total bobot di kisaran 300 dan Kecamatan Dolopo Pada tahun 2008-2014 dengan kisaran bobot 400. Wilayah dengan sarana transportasi yang paling minim yaitu Kecamatan Kare, hal ini wajar karena wilayah ini merupakan dataran tinggi dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Madiun dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan lindung.

Dari analisis data dan grafik komunikasi di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 terjadi peningkatan bobot sarana komunikasi pada tahun 2007. Dimana bobot pada tahun 2005 dan 2006 yaitu 13.659 kemudian meningkat menjadi 23.778 pada tahun 2007. Pada tahun 2008-2014 bobot

sarana komunikasi menjadi 36 pada tahun 2008 dan 2009, 38 pada tahun 2010-2013 dan 40 pada tahun 2014. Penurunan bobot sarana komunikasi ini terjadi karena indikator pengguna komunikasi pada tahun 2008-2014 tidak tersedia.



Gambar 6 Perkembangan Komunikasi di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016

Perkembangan komunikasi di kabupaten madiun dari data yang ada cukup baik meskipun dari indikator yang digunakan data jumlah pengguna jasa telekomunikasi tidak tersedia namun tiga tahun sebelumnya bisa menjagi gambaran mengenai perkembangan telekomunikasi di Kabupaten Madiun. Dari data yang ada perkembangan komunikasi di wilayah kecamatan dengan nilai tertinggi yaitu Kecamatan jiwan pada tahun 2005-2006, Mejayan pada tahun 2007 dan Sawahan pada tahun 2008-2014. Wilayah dengan bobot terendah yaitu Kecamatan Kare pada tahun 2005-2007 dan Kecamatan Wungu tahun 2008-2014.

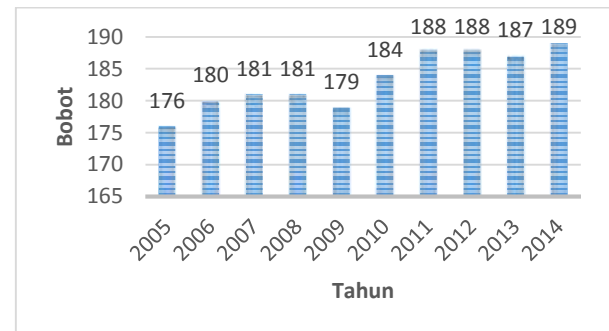
Berdasarkan analisis data kepadatan jalan, sarana transportasi dan komunikasi diperoleh hasil perkembangan indikator aksesibilitas, transportasi dan komunikasi pada masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Madiun.

Perkembangan indikator aksesibilitas, transportasi dan komunikasi di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 menunjukkan wilayah dengan skor tertinggi yaitu Kecamatan Geger pada tahun 2005-2007 dan Dolopo pada tahun 2005-2011. Sedangkan skor terendah yaitu Kecamatan Kebonsari pada tahun 2007-2011; Kare dan Gemarang pada tahun 2005-2014; Saradan dan wonosari pada tahun 2005-2011 serta Kecamatan Sawahan pada tahun 2005-2006.

1.3 Indikator Pelayanan Sosial Ekonomi

Tren ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Madiun dari tahun 2005-2014 mengalami peningkatan. Hanya saja untuk balai pengobatan fluktuatif, dimana pada tahun 2005-2008 mengalami peningkatan dan menurun pada tahun 2009 dan terus meningkat hingga tahun 2012, namun menurun kembali di tahun 2013 dan meningkat kembali pada tahun 2014. Tiap tahun rata-rata peningkatan sarana kesehatan di

Kabupaten Madiun yaitu 1,4 atau jika dibulatkan satu sarana kesehatan.



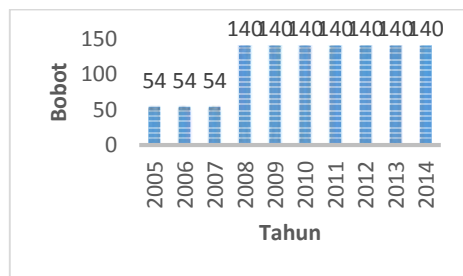
Gambar 7 Perkembangan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016

Hal yang menarik dari grafik di atas yaitu Kecamatan Dolopo yang awalnya lebih rendah dari wilayah lain dari tahun ke tahun meningkat hingga lebih tinggi dari wilayah lain kecuali dengan Kecamatan Geger sedangkan untuk wilayah lain ada yang mengalami peningkatan, fluktuasi, hingga menurun. Dimana perkembangan sarana kesehatan di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 dengan wilayah yang memiliki sarana kesehatan paling baik yaitu Kecamatan Geger sedangkan wilayah dengan bobot sarana kesehatan paling rendah yaitu Kecamatan Gemarang dan Wonosari.

Perkembangan ketersediaan sarana perekonomian di Kabupaten Madiun tidak begitu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Dari data yang ada perkembangan dari tahun

2005-2014 hanya mengalami perubahan sekali yaitu pada tahun 2008, namun perkembangan yang terjadi hanya sekali ini pertambahannya sangat drastic hingga pertambahan rata-rata di Kabupaten Madiun tiap tahunnya mencapai 10 sarana perekonomian.



Gambar 8 Perkembangan Fasilitas Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

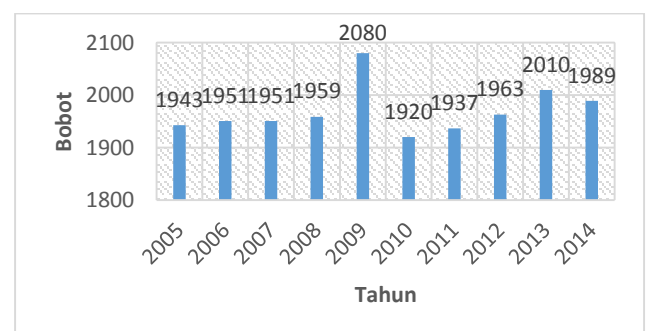
Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Perkembangan sarana perekonomian Kabupaten Madiun selama kurun waktu 2005-2014 menunjukkan wilayah dengan sarana perekonomian tertinggi yaitu Kecamatan Mejayan pada tahun 2005 dan 2006 dengan bobot 18 serta tahun 2007 dan 2008 dengan bobot 19, Kecamatan Saradan tahun 2009-2014 dengan bobot 20 namun di tahun 2013 dan 2014 Kecamatan Mejayan juga memiliki bobot yang sama yaitu 20.

Wilayah dengan bobot sarana perekonomian terendah yaitu Kecamatan Wungu dengan bobot hanya

tiga dari tahun 2005-2010 dan meningkat mmenjadi empat pada tahun 2011-2014

Dari tahun ke tahun antara tahun 2005-2014 ketersediaan fasilitas perekonomian di Kabupaten Madiun mengalami flktuasi namun secara umum mengalami peningkatan, hal ini bisa kita lihat dari rata-rata peningkatan sarana penddikan yaitu lima buah. Dari data yang ada hal ini di sebabkan karena tutupnya sekolahan-sekolahan swasta yang kekurangan murid. Grafik di bawah menunjukkan pola ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Madiun menarik untuk di kaji lebih dalam, dimana dari tahun 2005-2008 cenderung tetap namun meningkat drastis pada tahun 2009 sayangnya menurun drastis pada tahun 2010. Mengalami peningkatan kembali hingga tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014.



Gambar 9 Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014

Sumber : *BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016*

Grafik di atas menunjukkan wilayah dengan bobot sarana pendidikan tertinggi yaitu Kecamatan Geger dengan bobot di atas 200 pada tahun 2005-2014 terkecuali tahun 2007 dengan bobot 196 dan 2008 dengan bobot 195. Sedangkan wilayah dengan bobot terendah yaitu Kecamatan Gemarang pada tahun 2006 dan Kecamatan Sawahan pada tahun 2005-2014 dengan bobot di bawah 90.

Berdasarkan analisis data dan grafik ketersediaan sarana kesehatan,

Kesimpulan dari perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun yaitu Kecamatan Dolopo dan Geger dari tahun 2005-2014 termasuk kedalam klasifikasi wilayah maju. Selain itu wilayah yang masuk dalam kalasifikasi wilayah maju yaitu Kecamatan Dagangan pada tahun 2009, 2013 dan 2014; Serta Kecamatan Jiwan pada tahun 2005-2009, 2011 dan 2014.

Wilayah Kecamatan yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal dari tahun 2005-2014 yaitu Kecamatan Kare, Gemarang dan Wonosari. Sedangkan wilayah yang masuk klasifikasi tertinggal yaitu Kecamatan Kebonsari pada tahun 2007-2011; Wungu pada tahun 2012; Pilangkenceng pada tahun 2005, 2006 dan 2012 ; Madiun pada tahun 2007, 2008, 2010 dan 2012; dan

perekonomian, dan pendidikan menunjukkan wilayah dengan ketersediaan sarana kesehatan, perekonomian dan pendidikan dengan skor tertinggi yaitu Kecamatan Dolopo pada tahun 2006-2014, Kecamatan Dagangan pada tahun 2006 dan Kecamatan Saradan pada tahun 2005-2014 dengan skor delapan. Wilayah dengan skor perkembangan terendah yaitu Kecamatan Kare, Gemarang, Wonosari dan Sawahan dengan skor tiga pada tahun 2005-2014.

Kecamatan Sawahan pada tahun 2005-2013.

2. Variasi Daya Dukung

Hasil dari analisis Kawasan lindung di Kabupaten Madiun yaitu luas wilayah kecamatan di luar kawasan lindung (lahan potensial) pada masing-masing wilayah setelah itu dihitung persentase terhadap luas wilayah Kabupaten madiun. Proses selanjutnya yaitu pengklasifikasian dengan perhitungan nilai tertinggi (17) dikurangi nilai terendah (dua) dan dibagi menjadi tiga kelas, diperoleh hasil lima. Sehingga angka tersebut menghasilkan klasifikasi potensial dengan persentase 14-18, kendala dengan persentase 8-13 dan limitasi dengan persentase 2-7.

Dari hasil analisis kawasan lindung diperoleh hasil bahwa wilayah yang memiliki daya dukung lahan potensial dengan klasifikasi potensial yaitu Kecamatan Kare dengan persentase 16,62 % dan Kecamatan Saradan dengan Klasifikasi potensial yang memiliki persentase luas wilayah potensial sebesar 13,42 %.

Wilayah dengan klasifikasi daya dukung lahan potensial limitasi yaitu Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Mejayan, Wonosari, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan.

Berdasarkan kriteria kemampuan lahan dan peruntukan lahan diperoleh pedoman pengembangan perkotaan. Setelah diketahui data kondisi topografi wilayah masing-masing dan dilakukan analisis terhadap kemampuan dan peruntukannya diperoleh hasil bahwa wilayah yang masuk dalam kategori Potensial atau wilayah yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yaitu hampir semua wilayah kecamatan terkecuali wilayah Kecamatan Gemarang dan Dagangan yang masuk dalam kategori wilayah kendala, yaitu wilayah yang kurang cocok untuk pengembangan perkotaan dikarenakan memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi

terhadap bencana alam dan wilayah Kecamatan Kare yang masuk kategori wilayah limitasi atau wilayah yang sangat tidak cocok untuk dikembangkan untuk kegiatan perkotaan dikarenakan lapisan tanahnya yang tipis dan sangat tidak stabil.

Wilayah di Kabupaten Madiun berdasarkan daya dukung wilayahnya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu wilayah potensial, kendala dan limitasi. Berdasarkan hasil analisis kawasan lindung dan analisis daya dukung lahan di Kabupaten Madiun wilayah yang memiliki daya dukung lahan potensial dan daya dukung lahan yang paling sesuai untuk pengembangan perkotaan yaitu Kecamatan Saradan.

3. Evaluasi Penentuan Ibukota Kabupaten Madiun

3.1 Kelayakan Wilayah-Wilayah Kecamatan Sebagai Ibukota Kabupaten

Dari hasil penelitian mengenai analisis perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun diperoleh hasil bahwa wilayah yang masuk ke dalam klasifikasi maju yaitu Kecamatan Dolopo dan Geger pada tahun 2005-2014; Jiwan pada tahun 2005-2009, 2011 dan 2014 serta Kecamatan Dagangan pada tahun 2009, 2013 dan

2014. Sedangkan hasil dari analisis daya dukung wilayah diperoleh hasil bahwa wilayah yang memiliki daya dukung lahan potensial dengan klasifikasi potensial yaitu Kecamatan Kare dan Gemarang. Sedangkan wilayah yang memiliki daya dukung lahan dengan klasifikasi potensial yaitu seluruh wilayah di Kabupaten Madiun kecuali Dagangan, Kare dan Gemarang.

Berdasarkan analisis perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun, wilayah yang masuk dalam klasifikasi layak sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Dolopo, Geger dan Jiwan. Dari ketiga wilayah tersebut jika melihat dari skor tertinggi, maka wilayah yang dinilai lebih baik dibandingkan wilayah lain yang ada di Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Dolopo. Seharusnya guna mendukung tujuan pemindahan pusat pemerintahan yaitu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Madiun wilayah yang dipilih sebagai pusat pemerintahan adalah Kecamatan Dolopo (lampiran 1).

Hal ini patut untuk dipertimbangkan mengingat dari tahun

2005 hingga tahun 2014 Kecamatan Dolopo selalu masuk dalam klasifikasi wilayah maju dengan memiliki nilai indeks komposit perkembangan tertinggi dibandingkan wilayah lain yaitu 230. Daya dukung lahan di Kecamatan Dolopo juga baik dengan memiliki klasifikasi daya dukung lahan yang masuk dalam klasifikasi potensial meskipun luas wilayahnya tidak seluas Kecamatan Kare, Saradan, Gemarang dan Pilangkenceng namun hal ini bisa didukung oleh wilayah lain di sekitarnya serta keberadaan rumah sakit di Kecamatan Dolopo.

Jika melihat dari aksesibilitas wilayah memang Kecamatan Jiwan lebih baik dibandingkan Kecamatan Dolopo Dan Geger. Kecamatan Jiwan dilalui oleh jalur Surabaya-Yogyakarta sedangkan Kecamatan Dolopo dan Geger merupakan wilayah yang dilalui jalur alternatif Surabaya-Yogyakarta. Sedangkan berdasarkan lokasinya Kecamatan Dolopo dan Jiwan merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain serta Geger yang berada di pinggir wilayah. Untuk lebih jelasnya perhatikan klasifikasi perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun serta peta kelayakan wilayah sebagai pusat pemerintahan.

3.2 Evaluasi Penentuan Kecamatan Mejayan Sebagai Ibukota Kabupaten

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa Kecamatan Mejayan pada tahun 2005-2014 masuk dalam klasifikasi berkembang, ini berarti masih ada wilayah lain yang lebih baik dibandingkan Kecamatan Mejayan untuk dipilih sebagai pusat pemerintahan. Selain itu wilayah ini juga memiliki limitasi daya dukung lahan potensial yang berarti bahwa luas lahan di Kecamatan Mejayan masuk kedalam klasifikasi rendah di bawah Kecamatan Kare, Saradan, Gemarang dan Pilangkenceng.

Pemerintah Kabupaten Madiun memilih Kecamatan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten dengan pertimbangan akses yang dilalui jalan utama Yogyakarta-Surabaya, limitasi daya dukung lahan potensial bisa diatasi dengan mengembangkan perkotaan di wilayah sekitar apalagi Saradan Gemarang dan Pilangkenceng yang notabennya adalah tiga dari empat wilayah yang paling luas di Kabupaten Madiun. Wilayah yang masih berkembang dapat diatasi dengan melakukan pembangunan di wilayah ini

supaya lebih mendukung untuk dikembangkan sebagai perkotaan.

Diantara perkembangan indikator yang masih rendah di Kecamatan Mejayan yaitu aksesibilitas, transportasi, komunikasi, sarana kesehatan, terutama sarana pendidikan, sebab hingga saat ini masih belum ada satupun perguruan tinggi di Kabupaten Madiun baik itu Politeknik, Sekolah Tinggi, maupun Universitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis perkembangan dan daya dukung wilayah yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa :

1. Tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 menunjukkan peningkatan.

Dimana variasi tingkat perkembangan tahun 2005-2014 menunjukkan wilayah dengan klasifikasi maju yaitu Kecamatan Dolopo dan Geger; Dagangan pada tahun 2009, 2013 dan 2014 serta Jiwan pada tahun 2005-2009, 2011 dan 2014. Sedangkan wilayah wilayah tertinggal dari tahun 2005-2014 yaitu Kecamatan Kare, Gemarang, Wonosari dan Balerejo; Kebonsari pada tahun 2007-2011;

Wungu pada tahun 2012; Pilangkenceng pada tahun 2005, 2006 dan 2012 ; Madiun pada tahun 2007, 2008, 2010 dan 2012; dan Sawahan pada tahun 2005-2013.

Variasi daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun menunjukkan wilayah yang memiliki daya dukung lahan potensial dan daya dukung lahan yang paling sesuai untuk pengembangan perkotaan yaitu Kecamatan Saradan. Sedangkan Gemarang memiliki daya dukung lahan potensial dan daya dukung lahan dengan klasifikasi kendala serta Pilangkenceng memiliki daya dukung lahan dengan klasifikasi potensial namun daya dukung lahan potensialnya termasuk klasifikasi kendala. Sedangkan wilayah yang memiliki limitasi yaitu Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Mejayan, Wonosari, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan.

2. Berdasarkan analisis tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah, Kecamatan yang memiliki nilai paling tinggi yaitu Kecamatan Dolopo. Jadi wilayah yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun yaitu Kecamatan Dolopo.

Saran

Merujuk pada hasil penelitian di atas, ada beberapa hal yang dapat disarankan, diantaranya adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Madiun hendaknya segera memperbaiki perkembangan dan daya dukung Kecamatan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten madiun untuk mendukung tujuan pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun sehingga terwujud pelayanan yang maksimal kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
2. Dalam pembangunan wilayah pemerintah seharusnya segera melaksanakan percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan memperbaiki perkembangan wilayah di Kecamatan Mejayan dengan memfokuskan pada bidang-bidang yang memiliki perkembangan rendah yaitu aksesibilitas, transportasi, komunikasi, sarana kesehatan, terutama sarana pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Rahardjo dan Adisasmita Sakti Adji. 2011. *Logika Pemindahan Ibukota Jakarta*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anwar, Affendi. 2005. *Ketimpangan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan: Tinjauan Kritis*. Bogor : P4W Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2009. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun. 2006-2015. *Kabupaten Madiun Dalam Angka.Tahun 2006-2015*. Madiun : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun.
- Blair, J.P. 1991. *Urban and Regional Economics*. Irwin inc.585 pp.
- CV. Kumara Associaties. 2010. *Laporan Akhir Feasibility Studi Pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2010*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Djunaidi Achmad. 2012. *Proses Perencanaan Wilayah dan Kota*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Doni Tri Prasetyo. 2009. “*Analisis Perkembangan Wilayah Di Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 dan 2007*”. *Skripsi Sarjana*. Surakarta : Fakultas Geografi UMS.
- Hadjisaroso, Poernomo. 1981. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Jakarta : Departemen Pekerjaan Umum.
- Hanafiah, Djohan. 1989. *Palembag Zaman Baru, Citra Palembang Tempo Doeloe*. Palembang : Humas Pemda Kotamadya Palembang.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya : Penerbit Usaha Nasional.
- Isard W.1975. *Introduction to Regional Science*. Prentice-Hal Inc. Englewood Cliffs, New Jersey.
- Johnston, R.J. 1975. *Classification in Geography*. Catmog 6. Geobooks. Norwich.
- Mulyanto H.R. 2008. *Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Murty, S. 2000. *Regional Disparities: Need and Measures for Belanced Development In Regional Planning and Sustainable Development*. New Delhi : Kanishka Publishers
- Muta’ali Lutfi. 2011. *Kapita Selektta Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Muta’ali Lutfi. 2012. *Daya Dukung Lingkungan Untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada.
- Mutha’ali, Luthfi. 1997. *Ketimpangan Wilayah di Indonesia dalam Perspektif Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta : Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.

- Nir, Dov. 1990. *Region as a socio-environmental system; An Introduction to a systemic regional geography*. Kluwer Academic Publishers. 182 P.
- Pemerintah Kabupaten Madiun. 2011. *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Madiun tahun 2011*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Pemerintah Kabupaten Madiun. 2013. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2013-2018*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Pemerintah Kabupaten Madiun. 2015. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Madiun Tahun 2015*. Madiun : Pemerintah Kabupaten Madiun.
- Rondineli, dennis A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis ; The Spatial Dimensions of Development Policy*. London : Westview Press.
- Rustiadi Ernan and T Kitamura. 1998. *Analysis of Land Use Changes in City Suburbs*. *Journal of Rural Planning Association*. 17 (1), Hal 20-31.
- Rustiadi Ernan, Saefulhakim Sunsun, Dan Panuju Dyah R. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Crestpent Press Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Sabari Yunus, Hadi. 2005. *Menejemen Kota Perspektif Spasial*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sarundajang, Sinyo Harry. 1997. *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Tinjauan Khusus Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung : Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan. Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Teuku Iskandar Mirza. 2006. “*Penentuan Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Perkembangan Wilayah, Aksesibilitas dan Persepsi Pemangku Kepentingan*”. *Tesis Pascasarjana* Bandung: Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Todaro Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa Drs. Han Munandar, M.A. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- UNDP. 1996. *Human Development Report*. New York : Oxford University Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lampiran 1. Peta Kelayakan Wilayah Kecamatan Sebagai Ibukota Kabupaten Madiun

